

**SOLUSI DAMAI DI TANAH PAPUA
(MENGUBUR TRAGEDI HAM DAN MENCARI JALAN KEDAMAIAN)¹**Natalius Pigai²***Abstract***

Papua will always be associated with violence, ignorance, nudity, poverty, backwardness and isolation. This paper would like to expose a viewpoint of Papua's issue comprehensively. The special autonomy policy given to the people of Papua at least raises new hope and amid political liability of integration in Papua. Specially It was granted to coincide with the special autnomy granted coincidentally an Christmas day only become a Christmas gift for the Christian community in Papua but it was also substantially realized. However, tragedies that were experienced by the people of Papua emphasized their suffering. Papua is a wounded territory in agony due to the penetration of capitalism which was followed by civil penetration and state hegemony. The disharmony between Jakarta-Papua for over 50 years has not ended yet. It is claimed that the government has not been able to implement in earnest the four basic intention formulated by the Indonesian Institute of Sciences(LIPI) as Papua Road Map. Although LIPI has formulated four root problems in Papua, only two main issues really triggered the conflict in Papua; namely the traumatic history of human tragedy and the completion of economics as well as overcoming social disparities and culture.

¹ Versi awal paper disampaikan dalam seminar internasional bertajuk “*Bringing Justice and Peace to Papua: Assesment on Asymmetrical Local Autonomy, Communal Property Right on Land and Conflict Resolution*” (24-25 september 2013) diselenggarakan oleh Centre for Public Policy and Management Studies (CPMS) UNPAR.

² Natalius Pigai, Komisioner/ Ketua Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan pelanggaran HAM, Komnas HAM RI Periode 2012-2017

Pengantar

Pembicaraan mengenai Papua akan selalu diasosiasikan dengan kekerasan, kebodohan, ketelanjangan, kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisolasian. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab atas keterbelakangan mereka? Pada saat ini ada kecenderungan di masyarakat Papua bahwa upaya integrasi yang dibangun dengan jerih payah sejak 50-an tahun silam ternyata hanya sekedar integrasi Sumber Daya Alam (*Integrated of Natural Resources*), sementara manusianya diabaikan, merana di atas kelimpahan tanah sendiri. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan Ir. Soekarno yang ingin memerdekakan manusia Papua agar mereka menjadi tuan di tanah mereka sendiri.

Tulisan ini ingin menyampaikan sudut pandang persoalan Papua secara komprehensif. Meskipun saat ini kebijakan otonomi khusus yang telah diberikan kepada rakyat Papua setidaknya memberi harapan baru di tengah labilitas integrasi politik di Papua yang telah menua, namun tragedi demi tragedi yang dihadapi rakyat Papua semakin mempertegas penderitaan yang dihadapi rakyat Papua. Otonomi Khusus yang diberikan bertepatan dengan Hari Natal sebagai sebuah “Kado Natal” tidak hanya menjadi sebuah parcel spritualitas simbolik bagi umat nasrani di Papua tetapi juga diwujudkan secara substansial. Dampaknya saat ini *sesungguhnya Papua menjadi sebuah negeri yang terluka dalam nestapa akibat penetrasi kapitalisme yang diikuti oleh penetrasi sipil dan Hegemoni Negara.*

Disharmoni Jakarta-Papua yang berlangsung selama lebih dari 50 tahun belum kunjung usai karena pemerintah belum mampu melaksanakan secara sungguh-sungguh empat intensi dasar konflik yang beberapa tahun lalu telah dirumuskan melalui *Papua Road Map* oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meskipun LIPI telah merumuskan empat akar persoalan di Papua, namun hanya dua persoalan utama yang memicu konflik di Papua yaitu: trauma sejarah disertai tragedi kemanusiaan yang menjadi memori buruk bagi orang Papua atau menurut LIPI; peninjauan kembali terhadap realitas sejarah Papua dan penyelesaian disparitas ekonomi dan Sosial dan Budaya.

Pelanggaran HAM Bidang Sipil dan Politik di Papua dan Papua Barat

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005. Dengan meratifikasi konvensi PBB tersebut secara otomatis Indonesia mempunyai kewajiban untuk mendorong kemajuan dan penegakan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya Komnas HAM RI akan melaporkan secara periodik baik melalui forum multilateral seperti Sidang Dewan HAM PBB, serta *Universal Periodic Review* yang dievaluasi secara 4 tahun sekali. Pelanggaran HAM bidang sipil dan politik di Papua tentu mendapat perhatian sebagaimana pelanggaran HAM yang terjadi di bagian lain di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan beberapa kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan mendapat perhatian baik oleh Komnas HAM, berbagai aktivis HAM, serta lembaga internasional.

Soal Sejarah Integrasi Papua

Konflik politik di Papua tidak begitu saja jatuh dari langit namun berakar dari peristiwa sejarah kolonialisme. Karena itu persoalan Papua pun bermula dari sejarah kolonialisme yakni ketika hadirnya kolonialis Belanda. Meskipun kita berpandangan bahwa sejak 1969 melalui Pepera, integrasi politik atas wilayah sudah selesai, namun sebagian kalangan di Papua dan beberapa elemen internasional menganggap, hingga kini masih belum usai. Hal ini disebabkan karena klaim Indonesia dan Belanda baik melalui jalur diplomasi maupun juga konfrontasi dipenuhi dengan sikap koperatif antar penguasa

demi kepentingan pembendungan ideologi komunisme internasional. Masyarakat Papua menganggap tidak pernah melibatkan rakyat Papua dalam proses integrasi politik. Dari setiap perundingan, rakyat Papua hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek dalam pengambilan keputusan sehingga bertentangan dengan konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik yaitu, partisipasi yang merupakan hak mutlak dalam aspek hak asasi manusia. Selanjutnya, masih menurut pandangan sebagian masyarakat Papua bahwa, pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri bagi suatu bangsa (*GA Resolution No 1541 (XV)*) tahun 1960, dimana pada waktu yang bersamaan, Papua Barat telah menyatakan deklarasi kemerdekaan dan sosialisasi simbol-simbol negara bangsa (*nation state symbols*). Disamping itu konsensus politik 1969 yang disebut Pepera dilaksanakan dibawah tekanan Indonesia, termasuk pelaksanaan dengan sistem demokrasi yang dianut berdasarkan Pancasila yakni musyawarah mufakat yang berbeda dengan standar internasional (*one man one vote*) sesuai dengan *New York Agreement*. Alasan Indonesia bahwa penyelenggaraan musyawarah mufakat adalah karena kondisi sosial, ekonomi, geografis dan peradaban hidup primitif, hal ini berbeda dengan Resolusi Majelis Umum PBB 14 Desember 1960 (*GA Resolution No. 1514 (XV)*) yang menegaskan bahwa penjajahan dengan segala bentuk manifestasinya harus diakhiri sehingga alasan dengan belum adanya kesiapan dari kondisi politik, ekonomi atau sosial bukanlah alasan ditundanya kemerdekaan bagi sebuah bangsa. Ekspresi kekecewaan atas pelaksanaan itu, memunculkan ancaman serius dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak itu pemerintah Jakarta mulai memainkan labilitas integrasi politik dengan menempatkan orang Papua di dalam kubangan hegemoni negara. Karena itulah sepanjang berintegrasi dengan Indonesia, rakyat Papua senantiasa berontak melalui berbagai aksi kerusuhan, pengrusakan, pembunuhan, penyanderaan yang objek/sasarannya adalah kepada masyarakat pendatang (*orang amber*) yang merupakan bagian integral dari sistem politik Jakarta. Hal ini merupakan ekspresi kekecewaan dan ungkapan kebencian atas trauma historis dan sejarah penderitaan (*the history of sadness*) terhadap pemerintah negara-kebangsaan Indonesia.

Tragedi Hak Asasi Manusia di Papua

Dalam rangka mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan pengkondisian di wilayah Papua yang kemudian diikuti dengan berbagai tindakan penegakan dalam bentuk melakukan operasi-operasi keamanan yang bertujuan untuk menumpas gerakan separatisme di Papua. Berbagai bentuk tindakan operasi tersebut, telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh para *korban yang justru tidak punya kaitan dengan kegiatan separatis*.

Negara, dalam hal ini aparat keamanan, mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan operasi keamanan dalam rangka mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya ditemukan adanya berbagai penyimpangan yang berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama berlangsungnya operasi keamanan di wilayah Papua, antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Peristiwa Enarotali

Setelah Pepera, banyak pelanggaran terjadi kepada hak warga Papua, terutama adalah hak yang disebutkan dalam Pasal 22 Perjanjian New York yang berhubungan dengan hak-hak termasuk hak atas kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, penduduk

asli tidak diakui dan hak atas partisipasi. Meskipun usaha untuk memenangkan Pepera sudah dilakukan, tetapi ada perlawanan di beberapa tempat seperti di Erambo (Merauke), Dubu/Ubrub (dekat perbatasan), Enarotali dan Wahgete (Paniai).

Di Enarotali perlawanan lebih hebat dilakukan dengan melancarkan gerakan bersenjata dan secara terang-terangan menolak bergabung dengan Indonesia yang dipimpin oleh A.R Wamafma, Senen Mote, Mapia Mote, dan Thomas Douw. Gerakan tersebut juga didukung oleh beberapa orang polisi yang berpihak kepada penduduk lokal. Untuk menghentikan gerakan ini, Pangdam Sarwo Edi Wibowo memerintahkan untuk menghancurkan kelompok bersenjata dimana 634 penduduk diindikasikan dalam peristiwa ini terbunuh.

b. Peristiwa Timika

Akumulasi perlawanan masyarakat Amungme atas berbagai kesewenangan PT. Freeport Indonesia terjadi pada 1977. Pada saat itu, masyarakat kembali melakukan aksi damai di Agimuga untuk menyuarakan protesnya atas tindakan perusahaan yang telah merampas tanah-tanah adat tanpa mempedulikan hak-hak masyarakat. Aksi protes masyarakat tersebut dihadapi dengan tindak kekerasan, yakni dengan melakukan operasi melalui pesawat udara. Diperkirakan 30 orang warga sipil terbunuh akibat tindakan tersebut³.

Sehari kemudian, tindakan ini direspon oleh masyarakat dengan melakukan pemotongan pipa-pipa saluran yang berfungsi untuk mengantarkan konsentrat emas dan tembaga dari *Millsite* ke pelabuhan Amamapare. Aparat melakukan operasi dengan menghujani peluru dan bom melalui pesawat udara serta menghancurkan kampung Waa dan Kwamki Lama juga menghancurkan rumah-rumah warga dan gereja di sejumlah kampung seperti Amungin, Womoumaki, Kampung Baru, Nokorumon, Tsinga, Asuwagoumom, Basowagoumom serta daerah-daerah lainnya setelah kurun antara 1973 sampai dengan 1977. Selanjutnya terdapat fakta peristiwa yang terjadi di Timika antara tahun 1994 dan 1995. Peristiwa tersebut ialah berupa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penghilangan dan penganiayaan warga sipil serta perusakan rumah dan kebun milik penduduk yang diduga anggota atau simpatisan atau keluarga OPM. Pada 31 Mei 1995, aparat menyerbu jemaat gereja Hoesa yang menyebabkan 11 orang warga tewas.⁴

Sebelumnya, pada 6 Oktober 1994 aparat juga menculik empat orang warga, yakni Sebastianus Kwalik, Romulus K, Marius K, dan Hosea K, dari rumah mereka. Keempat orang tersebut dibawa menggunakan mobil dan selanjutnya ditahan dalam sebuah kontainer. Menurut istri Sebastianus, selama berada di dalam kontainer mereka disiksa dan setelah seminggu ditahan, keempat orang tersebut tidak dapat lagi ditemukan oleh keluarganya⁵.

c. Peristiwa Biak Barat dan Biak Utara

Pada tahun 1974, terjadi pembunuhan massal di Kampung Busdori, Krisdori (Biak Barat) dan Ampobukor (Biak Utara). Diperkirakan sebanyak 45 orang disiksa dan dibunuh. Di sana adanya tiga lokasi kuburan yang menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat setempat

³ Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme, Antara Freeport dan Militer*, ELSAM, Jakarta, 2003: hal. 61

⁴ *Ibid*, hal. 93

⁵ *Ibid*, hal. 95

merupakan kuburan korban pembunuhan oleh aparat pada tahun 1974. Lokasi pertama berada di pinggir pantai, yang akibat tsunami pada 1996, telah terendam oleh air laut. Di lokasi ini dilaporkan sebanyak 7 (tujuh) orang sekeluarga dibunuh/ dieksekusi.

Kemudian di lokasi kedua, terdapat satu liang kuburan yang berisi dua orang yang diduga sebagai korban penembakan. Salah satu korban dilaporkan adalah anak kecil. Lokasi ketiga adalah di pinggir jalan dan dilaporkan bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditembak mati. Selain di tiga lokasi tersebut, ada empat lokasi lain yang dilaporkan sebagai kuburan massal yang letaknya di tengah hutan belantara. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, di setiap kampung di Biak Barat hampir bisa ditemukan lokasi kuburan korban penembakan. Namun, karena masih ketakutan dan trauma, masyarakat belum berani menyampaikannya secara terbuka⁶. Juga pada 1974, di kampung Makuker dan Workwar Biak, terjadi penyiksaan dan pembunuhan dengan korban jiwa hampir 121 orang. Kemudian pada 1975, di kampung Arwam dan Rumbin, terjadi pembunuhan terhadap 41 orang secara massal.

d. Peristiwa Wamena, Jayawijaya.

Di wilayah Pegunungan Tengah, khususnya di Jayawijaya, pada tahun 1977/1978 terjadi serangan terhadap penduduk sehingga menimbulkan korban jiwa yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Pada 1977, tepatnya pada Rabu tanggal 23 April jam 03.00, Pos Pemerintahan Kobakma Kecamatan Bokondini, Kabupaten Jayawijaya diserang oleh OPM sehingga Pemilihan Umum menjadi gagal dan tidak terlaksana, terkecuali kota Wamena.

Pasca peristiwa tersebut, OPM melakukan serangan kepada aparat dilakukan secara meluas di wilayah lain, di antaranya di Tiom, Ilaga, dan Tembapapura. Sebagai respon atas serangan tersebut, Mayjen (Purn) Samsudin menceritakan bahwa ia memerintahkan anak buahnya untuk tidak balas menyerang, tetapi bertahan di pos masing-masing. Namun karena serangan oleh OPM meluas dan semakin tidak terkendali, ia meminta bantuan tambahan pasukan termasuk dari Angkatan Udara. Angkatan Udara menurunkan 1 Helikopter Puma, 2 Helikopter Tempur, dan 1 pesawat pemburu/pembom jenis Bronco OV-10. Berbeda dengan cerita dari masyarakat yang menyebutkan adanya bom dan bekas-bekas bom *napalm* di wilayah Bolagme. Mayjen (Purn) Samsudin menyatakan tidak pernah ada penggunaan bom. Memang ia mengaku pernah meminta bantuan berupa bom *napalm*, namun tidak diijinkan sehingga helikopter dan pesawat hanya dibekali dengan senjata otomatis. Pesawat-dan heli ini bukan hanya memberondongkan peluru ke desa-desa yang dihuni ribuan orang itu melalui udara, tapi juga menjatuhkan beberapa bom *napalm*. Pesawat-pesawat itu memberondongkan peluru hingga habis.⁷

Dalam peristiwa Wamena 1977 dikemukakan oleh Muridan Widjojo.⁸ Menurutnya, dalam peristiwa tersebut ada setidaknya tiga tahap. Sedangkan jumlah korban di pihak aparat diperkirakan sebanyak 50 hingga 100 orang. Tahap ke dua pasca-penyerangan ini adalah OPM

⁶ Hasil pengamatan lapangan Tim Komnas HAM di Biak Barat, 26 November 2008

⁷ Lihat Robin Osborne, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Elsam, Jakarta, 2001, hal. 142-155. Pasca perang Vietnam, penggunaan bom *napalm* telah dinyatakan terlarang oleh PBB dan dogolongan sebagai senjata pemusnah massal karena efek kerusakan dan kematian yang diakibatkannya. Bom ini digunakan Amerika Serikat saat perang Vietnam untuk menghancurkan gerilyawan Vietcong yang bersembunyi di hutan-hutan. Sebuah bom *napalm* yang dijatuhkan akan menimbulkan efek bakar yang menjangkitkan arel seluas dua kali lapangan bola.

⁸ Non State Actors and the Cycle of Violence in Papua, Muridjan S. Widjojo, LIPI, 2006

lari ke hutan untuk bersembunyi. Di Kobakma, aparat membakar sejumlah rumah dan desa-desa. Pada tahap ini, kebanyakan masyarakat mati karena kelaparan dan terserang penyakit di hutan. Kemudian pada tahap ketiga adalah yang sangat menghancurkan. Pada tahap ini masyarakat mulai kembali ke desa-desa mereka. Mereka yang kembali di desa kemudian secara sistematis diperkosa dan dibunuh secara kejam aparat dan warga sipil pro Indonesia. Dalam kesimpulannya, pada peristiwa Wamena 1977 ini diperkirakan korbannya antara 10.329 orang hingga 12.397 orang.

e. Peristiwa Bela dan Alama

Sebagai reaksi atas penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok orang bersenjata terhadap sejumlah ilmuwan asal Inggris, Belanda, Jerman dan Indonesia, pada tanggal 9 – 15 Mei 1996 aparat melakukan sebuah operasi pembebasan sandera. Operasi keamanan ini dilakukan oleh pasukan gabungan. Selain dilakukan untuk membebaskan para sandera, operasi ini juga dilakukan untuk menghancurkan gerakan separatis OPM serta menangkap para anggotanya yang dipimpin oleh Kelly Kwalik dan Yudas Kogoya.

Bella dan Alama merupakan 2 (dua) desa yang terletak di Kecamatan Illaga, Kabupaten Paniai, Papua. Kedua desa tersebut terdiri dari sejumlah kampung kecil yang berada pada 2 (dua) lembah di bagian Selatan Pegunungan Tengah Papua dan secara adat termasuk ke dalam wilayah adat suku Amungme. Sebagaimana dilaporkan oleh Uskup Herman Moninghoff, OFM bahwa pembunuhan terhadap warga sipil diantaranya pembunuhan terhadap 20 orang warga desa Alama Keluarga Natramol Wandik bersama 10 orang warga lainnya, Wandik dan seorang istrinya, 3 orang anak laki-lakinya, seorang anak perempuannya beserta suami dan anak bayi mereka serta 3 orang kerabat lainnya. Selain membunuh keluarga Natramol Wandik, aparat juga membunuh 10 orang Nduga tersebut yakni pembunuhan terhadap Marthen Kemong, pembunuhan terhadap Zakarias Katagame, pembunuhan terhadap Ter Balinol, pembunuhan terhadap Marinus Deikmon, pembunuhan terhadap Ikadius Deikmon, dan pembunuhan terhadap Henok Mulugol

f. Peristiwa Biak Berdarah 6 Juli 1998.

Pada 6 Juli 1998, terjadi peristiwa kekerasan bersenjata yang dikenal dengan Peristiwa “Biak Berdarah”, yang menimbulkan korban tewas, luka-luka, dan hilang. Peristiwa ini bermula karena berkumpulnya massa yang jumlahnya ratusan di lapangan dekat bangunan Menara Air Biak pada 1 Juli 1998. Massa berdatangan untuk mendengarkan orasi Pilips Karma yang waktu itu mengibarkan bendera bintang kejora di puncak menara air.

Kemudian pada 6 Juli dini hari sekitar pukul 04.00, aparat keamanan mulai menyisir menuju ke lokasi pengibaran bendera bintang kejora. Di lokasi tersebut, masih terdapat kumpulan massa baik laki-laki maupun perempuan yang berjumlah sekitar 300 orang. Pos-pos penjagaan massa yang berdekatan dengan menara air disatroni aparat dan mereka ditodong dengan senjata serta dipukul dengan popor senjata supaya meninggalkan pos.

Aparat keamanan dengan senjata lengkap mulai mendekat ke kumpulan massa dengan membentuk formasi huruf-U. Ratusan aparat mengepung massa dan mendesak massa ke arah pelabuhan, yang jaraknya sekitar 200 meter dari pusat aksi. Sekitar pukul 4 dini hari, tanpa ada peringatan, aparat keamanan yang sudah mengepung massa mulai melepaskan tembakan

membabi buta dalam jarak sekitar 20 meter. Tembakan juga datang dari arah pelabuhan. Karena ditembak, Felipe Karma meminta agar massa tiarap untuk menghindari terjangan peluru yang terus ditembakkan dari berbagai arah selama kurang lebih 2 jam, dari pukul 04.00 hingga 06.00 pagi. Banyak massa yang mati tertembak dengan kondisi yang mengerikan. Massa yang bertahan terkena luka tembak, menyelamatkan diri ke segala arah.

Data yang dikumpulkan oleh Gereja Kristen Injili Irian Jaya menyebutkan, 8 orang meninggal, 3 orang hilang, 4 orang luka berat sehingga dievakuasi ke Makasar Ujung Pandang. Kemudian 33 orang luka ringan, dan 150 orang ditahan secara sewenang-wenang. Selain itu juga ditemukan 32 mayat misterius.

g. Pembunuhan Terhadap Theys Eluay

Kematian Theys Eluay, tokoh adat Papua yang juga Ketua Presidium Dewan Papua pertama kali diungkap setelah pernyataan Kapolda Papua, Irjen (pol) Made Mangku Prastika di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 15 Januari 2002. Menurutnya ada dugaan keterlibatan aparat setelah menganalisis keterangan 60 saksi yang telah di periksa termasuk tujuh orang aparat. Peristiwa pembunuhan terhadap tokoh besar yang dihormati orang Papua berindikasi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Pembunuhan Theys Eluay dengan cara yang tidak wajar justru mendatangkan tekanan dari pegiat HAM maupun pemerintah internasional, termasuk masyarakat Papua pada umumnya sampai saat ini.

h. Pembunuhan Terhadap Arnold AP

Pembunuhan terhadap Arnold Ap seorang budayawan Papua yang sedang mengembalikan identitas dan jatidiri melalui simbol-simbol budaya Papua dan mengembangkan dan membentuk imajinasi bangsa (budaya Melanesia). Akhirnya dia ditangkap oleh aparat dan mayatnya ditemukan di Pantai Pasir 6 Jayapura, pada tanggal 26 April 1984. Kematian yang tidak wajar ini sempat mengakibatkan arus pengungsi sebanyak 17.000 orang ke Papua New Guinea dan menimbulkan ketegangan hubungan diplomatik antara PNG-RI.

i. Kematian Dr. Thom Waggai

Sama halnya dengan Arnold Ap, Dr. Thom Waggai, orang yang memproklamasikan negara Papua Barat di tengah-tengah kota satelit Jayapura, ditangkap dan dibunuh dalam ruang tahanan ketika menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta, tanggal 13 Maret 1996. Menurut informasi yang beredar di masyarakat bahwa kematian Dr. Thom Waggai bermotif politik.

Pelanggaran HAM Yang Menjadi Perhatian Internasional Saat ini

a. Kasus Wasior dan Wamena

Pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu di Papua khususnya peristiwa Wamena berjumlah 115 orang tewas dan Peristiwa Wasior 71 orang telah ditindak lanjuti oleh Komnas HAM dengan melakukan penyelidikan melalui Tim Adhoc. Hasil penyelidikan telah diserahkan

kepada Kejaksaan Agung namun sampai saat ini belum dapat ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung. Peristiwa Wamena dan Peristiwa Wasior merupakan salah satu pemicu timbulnya rasa traumatik atau ingatan akan penderitaan atau memori buruk yang sampai saat ini masih dituntut penyelesaiannya oleh korban. Peristiwa Wasior dan Wamena berbeda dengan pelanggaran HAM berat lainnya karena terjadi setelah tahun 2000 dimana Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM dibentuk sehingga peradilannya tanpa harus melalui peradilan HAM *ad-hoc* sehingga jika pemerintah berniat menyelesaikan masalah Papua maka penyelesaian pelanggaran HAM Wasior dan Wamena merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat perhatian.

b. Daerah Tertutup bagi Wartawan Asing dan Pengekangan Kebebasan Pers

Sampai saat ini Provinsi Papua masih menjadi daerah yang kebebasannya masih dikontrol oleh negara. Provinsi Papua masih menjadi daerah yang belum terbuka (*blank spot*) dari akses informasi khususnya media asing, atau jurnalistik asing sehingga berbagai peristiwa terkait hak asasi manusia yang terjadi di Papua belum dapat dipotret secara objektif dan luas di seluruh dunia. Penekanan demi penekanan juga kerap dihadapi oleh wartawan lokal sendiri yang bertugas di Papua khususnya media yang mengadvokasi hak asasi rakyat dan media yang menyuarakan aspirasi mendapat tantangan oleh pemerintah daerah. Sebutan Media OPM kepada Tabloid Jubi dan Aprilia Wayar, Wartawati Jubi pada tanggal 17 Agustus 2013 oleh Gubernur Papua membuka tabir tersebut.

c. Pembungkaman Kebebasan Ekspresi

Akhir-akhir ini kebebasan ekspresi telah dikontrol oleh pemerintah khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Beberapa bulan terkahir ini puluhan aktivis yang ditangkap atau dihadang sebelum atau saat melakukan demonstrasi. Surat ijin berdemonstrasi yang dikeluarkan oleh kepolisian sebagaimana lazimnya di Indonesia tidak belalu untuk Papua, sebagian besar demonstran yang menuntut keadilan di Papua ditangkap karena kepolisian tidak mengeluarkan ijin demonstrasi sehingga para aktivis di Papua meskipun tidak mendapat ijin dari kepolisian namun mereka tetap melakukan demonstrasi sebagai kelompok Civil Society yang menyuarakan aspirasi. Dalam bulan ini⁹ Apolos Sewa Ketua Dewan Adat Maybrat ditangkap dan diinterogasi oleh Kapolres Sorong, demikian pula tanggal 16 September sejumlah 16 anggota KNPB ditangkap oleh aparat kepolisian di Papua, demikian pula di Merauke masyarakat yang menolak kehadiran proyek MIFE dikawasan hunian suku Malind Anim beri stigma sebagai anggota OPM.

d. Masalah Tahanan Politik di Papua

Sampai saat ini sebanyak 36 tahanan politik Papua yang ada di berbagai lembaga pemasyarakatan. Mereka dikenakan pasal makar atau kelompok yang diduga memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indoensia. Dari berbagai pantauan yang dilakuan oleh lembaga-lembaga NGO dan juga komnas HAM, ternyata kehidupan para tahanan politik di lembaga pemasyarakatan baik di Abepura, Nabire, Sorong Manokwari, Wamena dan beberapa kabupaten

⁹ Tahun 2014

lainnya sangat memprihatinkan. Ruang Tahanan mereka sangat memprihatinkan. Kenyamanan, kesehatan dan jaminan kebutuhan kurang layak, akibatnya ada yang meninggal dalam tahanan atau di lembaga pemasyarakatan karena perawatan kesehatan yang kurang memadai dan juga karena adanya tekanan fisik maupun psikis. Hal ini telah menjadi perhatian komnas HAM agar para tahanan politik diperlakukan secara manusiawi dan juga komnas telah memperjuangkan suatu amnesti para tahanan politik tanpa bersyarat kepada presiden sebagai bagian dari solusi damai di Papua.

Pelanggaran HAM Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Papua

Sumber Daya Alam Papua Yang Berlimpah

Menurut data Bappeda Papua pada tahun 2009, Sumber Daya Alam (SDA) di Papua saat ini terdapat sebanyak 2,5 miliar ton kandungan cadangan bahan tambang emas dan tembaga (*konsesi Freeport saja*), dan Tambang Tangguh juga memiliki cadangan gas 14,4 triliun kaki kubik dari enam lapangan atau sebanyak 24 TSCF dari total nasional 108 TSCF. Sebanyak 540 juta meter kubik potensi lestari kayu komersial, dan 9 juta hektar hutan konversi perkebunan skala besar, selain itu dengan panjang pantai 2 ribu mill dan luas perairan 228 ribu kilometer persegi dan Papua memiliki potensi perikanan 1,3 juta ton per tahun.

Provinsi Papua dan Papua Barat Termiskin di Indonesia

Di Provinsi Papua, dari 2 juta lebih penduduk yang ada saat ini, hampir setengah penduduk Papua yaitu 40,78% hidup dengan status Rumah Tangga Miskin (RTM). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) BPS 2010 menunjukkan Provinsi Papua merupakan provinsi termiskin nomor 2 di Indonesia yakni 34,88% setelah Papua Barat Provinsi Papua Barat 35,71% pada tahun 2009. Sedangkan bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang sumber daya alamnya lebih rendah dari Papua justru angka kemiskinan lebih baik, misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 23,03%, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 21,55%, Provinsi Bangka Belitung 18,94%. Padahal saat ini Papua dan Papua Barat adalah Provinsi dengan kewenangan Otonomi Khusus (UU 21 Tahun 2001) dengan dana pembangunan perkapita tertinggi di Indonesia. Total dana Otonomi Khusus 2002-2009 sebesar 9,353 triliun dan infrastruktur 2007-2009 dengan dana 2,5 triliun. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah Provinsi Papua adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK) di Provinsi Papua yang juga paling tinggi di Indonesia yaitu sebesar 2.99% dan Indeks keparahan kemiskinan pada Maret 2009 sebesar 3,57. Bila dibandingkan dengan Provinsi Lainnya maupun juga secara nasional, Indeks Keparahan Kemiskinan hanya 0.68% sampai dengan 1% saja.

Tingkat Inflasi dan Biaya Hidup Tertinggi

Tinggi-rendahnya tingkat inflasi dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di suatu daerah. Stabilitas harga di Provinsi Papua dan Papua Barat selain disebabkan karena peningkatan inflasi tiap tahun, juga diakibatkan karena jarak tempuh distribusi barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke kedua Provinsi yang sangat jauh sehingga memakan besarnya biaya transportasi.

Provinsi Papua dan Papua Barat, harga semen 1 sak di Jayapura Rp70.000; Wamena Rp500.000; Puncak Jaya Rp1.200.000; Maybrat Rp150.000. Harga beras bermerek berisi 25 kilogram Rp750.000-Rp.800.000 per karung di Puncak Jaya, Maybrat Rp250.000 sedangkan di Jakarta beras yang bermerek dan bermutu tinggi seperti Pandanwangi atau Rojolele untuk 25 kilogram hanya Rp80.000,- per karung. Di Pegunungan Bintang, harga minyak bensin untuk 1 liter mencapai Rp40.000, sedangkan saat ini harga nasional hanya Rp4.500,-. Melambungnya harga barang di daerah pedalaman Papua selain karena adanya inflasi yang tinggi, juga karena moda transportasi untuk melayani penduduk pedalaman Papua hanya dilalui melalui jaringan transportasi udara. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat belum mampu melakukan upaya pengendalian jalur distribusi barang dari pusat produksi sampai di konsumen di wilayah Papua. Padahal pedalaman Papua memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi yang berarti merupakan konsumen terbesar di Papua.

Provinsi Papua Barat dan Papua, Belum Ada *Grand Design* Pembangunan Infrastruktur

Dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, maka pemerintah pusat telah menargetkan sejumlah ruas jalan strategis dan prioritas yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas membutuhkan dana sebesar 9,78 triliun rupiah. Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah: Nabire-Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura-Wamena dan Mulia (733 km), Timika-Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui-Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura-Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km. Sementara itu 4 ruas jalan prioritas Provinsi Papua sebanyak 361 km; Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura. Dan untuk Provinsi Papua Barat ruas jalan strategis dan prioritas dari Manokwari-Oransbari, Sorong Taminabuan, Ayawasi, manokwari Sorong, Manokwari Nabire. Strategi penerobosan isolasi dan daerah terpencil di Papua tersebut di atas merupakan program pemerintah pusat sehingga untuk kedua provinsi sampai saat ini belum ada *grand design* pengembangan infrastruktur di Papua. Salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara. Pada saat ini di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis, dan hanya dilayani oleh 5 buah pesawat Merpati buatan 1975 serta tidak lebih dari 5 buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.

PAD Terkecil Di Tengah Kelimpahan

PT. Freeport Indonesia belum menjalankan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, misalnya dikabarkan belum membayar Pajak Pertambangan Umum (PPu) kepada Provinsi Papua sebesar 80%. Sebuah sumber mengungkapkan bahwa sampai saat ini Freeport hanya mampu membayar Pajak Bagi Hasil (PBh) sumber daya alam sebesar 18% sekitar 500 miliar saja dari yang seharusnya 80% atau sekitar 6 triliun rupiah sesuai dengan amanat Otonomi Khusus. Sementara keuntungan yang didulang Freeport setiap tahun terus meningkat. Laba bersih tahun 2002 Rp1,27 triliun, 2003 menjadi 1,62 triliun rupiah, tahun 2004 menjadi 9,34 triliun rupiah. Sekali lagi itu laba bersih bukan *sales* atau laba kotor. Rupanya amanat Otonomi Khusus tentang bagi hasil Pajak Pertambangan Umum 80% untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dipermainkan oleh pemerintah pusat. Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat seakan-akan tidak tahu menahu perihal tersebut. Hal tersebut berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua yang relatif kecil yaitu RP 360 miliar pada tahun 2009, dan untuk

Provinsi Papua Barat sebesar 30 Miliar (bandingkan saja PAD DKI Jakarta tahun 2009 mencapai 10,363 triliun).

Bahaya HIV/AIDS yang mengancam Papua

Kasus-kasus HIV-Positif yang terdeteksi melalui *surveilans* dengan bantuan hasil *test reagent* ELISA maupun juga *Western blot* menemukan bahwa sampai dengan Agustus 2010 sebanyak 5.000 Warga Papua terkena AIDS dengan prediksi bahwa jumlah penderita HIV/AIDS akan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang. Berbeda dengan kasus HIV/AIDS di Pulau Jawa yang penularannya melalui jarum suntik, untuk Papua penularannya lebih banyak melalui hubungan seksual sembarangan. Tingkat prevelensi (jumlah kasus) HIV dan AIDS di Papua dan Papua Barat sudah mencapai 2,4 persen, sedangkan secara nasional baru mencapai 0,5 persen. Peningkatan jumlah prevalensi HIV/AIDS ini akan terus meningkat secara deret ukur, sementara angka kelahiran mengalami pertumbuhan minimal (*minimizing zero growth*) secara deret hitung, sehingga diperkirakan penduduk Papua terancam berkurang drastis.

Epidemi Korupsi yang Menggurita di Papua

Dalam pandangan sebagian orang, Otonomi Khusus (Otsus) Papua diasosiasikan dengan materi (uang) triliunan rupiah. Maka tidaklah mengherankan jika hampir semua orang berebutan menikmati dana Otsus yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan masyarakat Papua. Ada dua gejala korupsi yang terjadi di Papua saat ini. *Pertama*, korupsi yang sistemik dan massif, dilakukan oleh pejabat publik baik birokrat, politisi dan pengusaha. Korupsi secara sistemik berlindung dibalik administrasi yang baik. *Kedua*, fenomena korupsi yang terjadi karena belum matangnya sistem pengelolaan dana Otsus, tanpa petunjuk teknis dan petunjuk operasional tentang pemanfaatan dana tersebut secara optimal memberi ruang korupsi di Provinsi Papua Barat dan Papua.

Kasus korupsi di Papua yang mencuat, diantaranya kasus korupsi mantan Bupati Wamena David Hubi. Penyelewengan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) oleh Bupati Yapen Waropen, Ir. Daud Soleman Betawi, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadilan Tipikor Jakarta. Kabupaten Mimika, dimana Kepolisian Daerah Papua telah menangani kasus penyalahgunaan barang inventaris rumah negara yang dilakukan oleh anggota DPRD Mimika Ny. Yolanda Tinal (Istri Clemens Tinal) dengan aset mencapai Rp. 5 miliar. Sedangkan di Kabupaten Biak Numfor selama tahun 2008, sudah tujuh pelaku korupsi yang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Biak di lembaga pemasyarakatan. Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo, saat ini ditahan di Penjara Sukamiskin Bandung. Kasus dugaan korupsi sebesar Rp 5,2 miliar yang melibatkan Ketua DPRD Drs. Jhon Ibo, MM, begitu pula halnya dengan kasus proyek fiktif Kabupaten Sorong Selatan yang menyeret Kepala BPKAD Provinsi Papua Achmad Hatari sebagai tersangka, kasus terbaru Ketua DPRD Papua Barat yang di tahan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura.

Hasil survei pelaku bisnis yang dirilis Senin, 8 Maret 2010 oleh perusahaan konsultan "*Political & Economic Risk Consultancy*" (PERC) yang berbasis di Hong Kong menyebutkan Indonesia mencetak nilai 9,07 dari angka 10 sebagai negara paling korup yang disurvei pada tahun 2010. Nilai tersebut naik dari tahun lalu yang poinnya 7,69. Sedangkan, posisi kedua ditempati oleh Kamboja sebagai negara paling korup. Sementara itu, Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dilakukan pada September sampai dengan Desember 2008, bertujuan

untuk mengukur tingkat korupsi pemerintah daerah berdasarkan persepsi pelaku bisnis setempat. Yogyakarta Kota Terbersih dari korupsi mendapatkan skor Tertinggi yaitu 6,43. Sementara itu Manokwari (3,39) termasuk Kota Terkorup nomor 1 di Indonesia, dan rata-rata sebagian besar kota di Provinsi Papua termasuk jajaran 10 besar kota terkorup di Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia Paling Rendah di Indonesia

Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari perbandingan harapan hidup saat kelahiran, pengetahuan yang diukur dari angka tingkat baca tulis pada orang dewasa serta standar hidup layak maka, untuk Indonesia pada tahun 1999 IPM 64,3% menjadi 71.17% di tahun 2008. Sedangkan Provinsi Papua tahun 1999 IPM 58,8% menjadi 64,00 di tahun 2008. Sedangkan untuk Papua Barat tahun 2008 sebesar 67,5 atau 68 di tahun 2010. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua paling rendah dari rata-rata nasional dan terendah diantara Provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan bila dibandingkan dengan Provinsi yang termiskin sumber daya alamnya seperti Sultra 69.00, Bengkulu 72.14, Jambi 71.99, untuk tahun 2008.

Tingkat Partisipasi Pendidikan Terendah di Indonesia.

Angka partisipasi pendidikan di Provinsi Papua Barat untuk tingkat Perguruan Tinggi hanya 7%, dan 49 % untuk SMU serta 43% untuk SMP demikian pula dengan SD. Hal yang hampir serupa juga terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2007, tingkat partisipasi pendidikan Sekolah Dasar di Provinsi Papua 82.92% (BPS, 2007), sedangkan rata-rata nasional lebih dari 93.75%. Dengan angka ini menempatkan Provinsi Papua berada di posisi ke 33 dari 33 provinsi di Indonesia, artinya tingkat partisipasi pendidikan di provinsi Papua paling rendah di Indonesia.

Tingkat Kepadatan Penduduk Rendah

Kepadatan Penduduk Provinsi Papua Barat dan Papua tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 kepadatan Penduduk Provinsi Papua termasuk Papua Barat adalah 2 orang penduduk tiap 1 Km², dan pada tahun 1990 menjadi 5 orang Penduduk tiap 1 Km², kemudian pada tahun 2005 kepadatan penduduk di Papua dan Papua Barat tidak mengalami peningkatan tiap Km² hanya dihuni oleh 7 orang dan tahun 2011 tiap km dihuni 8 orang untuk Papua Barat. Jumlah tersebut berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, misalnya Jawa Barat 757 orang tiap 1 km², Sumatera Utara 169 orang tiap 1 km². Serta masih lebih rendah dari kepadatan penduduk rata-rata nasional, 116 orang tiap 1 km².

Penduduk Papua Terancam Berkurang Drastis

Jumlah Penduduk Provinsi Papua (termasuk Papua Barat) pada tahun 1971 adalah sebanyak 923.449 jiwa, maka berdasarkan sensus penduduk tahun 2000 menjadi 1.684.144 juta jiwa, dan di tahun 2005 menjadi 1.875.388 juta jiwa, Provinsi Papua dan 500 Ribu pada tahun 2011 untuk Papua Barat. Dimana pada tahun yang sama untuk Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan secara drastis dari 6.621.831 juta jiwa di tahun 1971 menjadi 11.642.488 di tahun 2000 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 12.450.911 juta jiwa. Sedangkan jumlah penduduk nasional mengalami peningkatan dari 119.208.229 juta jiwa di tahun 1971, 205.132.458 pada tahun 2000, menjadi 237,6 juta jiwa di tahun 2010.

Laju pertumbuhan penduduk provinsi Papua termasuk Papua Barat untuk kurung waktu 1971-1980 adalah 2.67%, jumlah ini tidak mengalami peningkatan untuk kurung waktu 2000-2005 yaitu 2.17. Dengan melihat perbandingan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua dengan pertumbuhan penduduk Nasional maupun juga Provinsi Sumatera Utara maka baik Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional justru mengalami peningkatan sebanyak 2 kali lebih besar. Sedangkan untuk provinsi Papua dilihat dari rasio pertumbuhan penduduk baik dari segi kelahiran (*fertility*), kematian (*mortality*), penduduk yang masuk (*in-migration*) maupun juga penduduk yang keluar (*out-migration*) maka Papua mengalami pertumbuhan minimal (*minimizing zero growth*).

Salah satu faktor yang menyebabkan jumlah penduduk Papua *stagnan* atau bahkan lebih cenderung menurun adalah rasio Angka Kematian Bayi (ABK). Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, rasio Angka Kematian Bayi mencapai 63.33% untuk laki-laki dan 50.34% untuk perempuan, sehingga rata-rata rasio kematian bayi sebesar 56.65%. Rasio angka kematian bayi ini paling tertinggi di Indonesia bila dibandingkan dengan provinsi lainnya misalnya dengan DKI Jakarta rasionya hanya 24.79%, Sumatera Utara 43.69%, Jambi 47.68%.

Pada tahun 1971 migrasi yang masuk ke Papua 33.513 jiwa, sedangkan migrasi yang keluar di tahun yang sama sebanyak 6.446 jiwa. Kemudian pada tahun 1990 migrasi yang masuk 93.030 jiwa dan migrasi keluar 15.555 jiwa. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2000, migrasi yang masuk 332.308 jiwa dan migrasi yang keluar 46.824 jiwa. Bila dilihat dari data tersebut di atas maka jumlah penduduk Papua yang keluar dari Provinsi Papua sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk luar yang masuk ke Papua. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan jumlah penduduk Papua asli lebih sedikit dari pada jumlah penduduk dari luar Papua sehingga tidak mengherankan jika seringkali terjadi masalah-masalah bias migran (*migran bias risk*) di publik. Saat ini Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Kabupaten dan Kota seharusnya mulai mengantisipasi bila terjadinya ancaman kepunahan ras atau suku bangsa melanesia di bumi Papua¹⁰

Tabel 1. Perbandingan jumlah Migran Masuk dan Migran Keluar di Papua dan Papua Barat (1971-2000)

No	Tahun	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar
1	1971	33.513	6.445
2	1980	93.030	15.559
3	1990	261.308	30.786
4	2000	332.015	46.824
Jumlah		719.866	99.614

Sumber: Data diolah dari Sensus Penduduk BPS, 1971,1980 dan 2000

Angka Buta Huruf Pemuda Papua di Kedua Provinsi Tertinggi di Indonesia

Jumlah pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan pada tahun 2008 secara Nasional: 1) Tidak/Belum Pernah Sekolah 1,27%; 2) Masih/Sedang Sekolah 17.34%; 3) Tidak Sekolah Lagi 81.40%. Untuk Provinsi Papua dan Papua Barat pemuda yang berpartisipasi dalam pendidikan di tahun 2008 adalah: 1) Tidak /Belum Pernah Sekolah 23.86%; 2) Masih/Sedang Sekolah 16.45%; dan 3) Tidak Sekolah Lagi 59.69%.

Tabel 2. Tingkat pendidikan penduduk Papua

No	Karakteristik	Nasional	Papua
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	1.27%	23.86%
2	Masih/Sedang Sekolah	17.34%	16.45%
3	Tidak Sekolah Lagi	81.40%	59.69%

Dengan demikian jumlah pemuda yang tidak atau belum pernah sekolah di Provinsi Papua paling tinggi di Indonesia yaitu sebanyak 23,86%, setelah itu urutan kedua Provinsi Papua Barat 5,10%, selanjutnya Sulawesi Barat 3,66%, sementara provinsi lainnya masih dibawah 1%. Selain itu, bila dilihat dari pemuda yang tidak bersekolah lagi atau mereka yang telah menyelesaikan pendidikan untuk provinsi Papua hanya 59,69%, disusul Provinsi NAD 71,98% dan provinsi lainnya di atas kisaran 80%. Sebagai seorang putera Papua yang sangat memahami tentang kependudukan dan dinamika penduduk, tanpa prasangka buruk terhadap suku manapun di Indonesia, kebijakan kependudukan yang memproteksi penduduk pribumi Papua dari ancaman kepunahan sungguh-sungguh diperhatikan oleh semua komponen bangsa baik pemimpin di Papua maupun pemimpin di Jakarta.

Mayoritas Penduduk Papua Tamatan SD

Presentase jumlah pemuda Papua yang pernah mengenyam bangku sekolah, tertinggi pada tingkat SMA sebesar 24.72% dan terkecil pada tingkat perguruan tinggi sebesar 4.08%. Sementara sejumlah 32.49% adalah presentase pemuda Papua yang tidak menamatkan SD. Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya maka pemuda Papua yang tidak tamat SD Tertinggi di Indonesia, kemudian Gorontalo 27,70%, Sulawesi Barat 20,74%. Sedangkan yang Terendah DIY 1,73%.

Selanjutnya perempuan Papua yang tidak tamat SD 41,11%, lebih tinggi dibandingkan dengan Laki-laki yang hanya 23,38%. Tamatan SD, SMP, SMA, dan PT meskipun Laki-laki lebih banyak dari Perempuan, namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar. Oleh karena itu tidak mengherankan jika 20,01% pemuda Papua belum mampu membaca dan menulis atau buta huruf.

Penutup: Solusi Damai di Tanah Papua

Kita harus mengakui bahwa sampai saat ini Papua masih berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1969 meskipun melalui proses integrasi yang dipahami oleh sebagian masyarakat Papua sebagai sebuah proses yang cacat moral dan hukum. Sejak Papua berintegrasi proses

pembangunan integrasi politik dilakukan dengan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan kesejahteraan. Pendekatan Keamanan sangat mempengaruhi labilitas integrasi karena justru berbagai pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana digambarkan di atas timbul sebagai tragedi dan trauma kemanusiaan berlangsung sampai dengan saat ini. Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia seringkali menjadi perhatian berbagai komunitas yang peduli terhadap hak asasi manusia termasuk lembaga atau negara lain. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sejak tahun 2000 secara serius mendokumentasikan atau memotret kondisi riil pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang telah saya gambarkan di atas. Belum tuntasnya kasus pelanggaran HAM Wasior dan Wamena melalui Peradilan HAM, berbagai pelanggaran HAM pada masa Daerah Operasi Militer menjadi perhatian Komnas HAM karena Indonesia sebagai negara dibawah naungan PBB dengan dasar sebagai negara pihak yang menandatangani berbagai konvensi PBB lainnya maka berkewajiban melaporkan pelanggaran HAM di Indoensia kepada negara-negara lain di Forum PBB. Dan untuk pelanggaran HAM di Papua, Pemerintah belum melakukan upaya perbaikan secara konkrit untuk terciptanya iklim kondusif bagi kemajuan Hak Asasi Manusia di tanah Papua.

Komnas Hak Asasi Manusia menawarkan solusi damai bagi tanah Papua melalui dialog antara Jakarta dan masyarakat Papua seperti diinginkan oleh sebagian tokoh intelektual Papua untuk membicarakan 4 variabel persoalan yang dikemukakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagaimana sebagian besar soal telah di jelaskan di atas. Dialog Jakarta Papua juga tidak membicarakan masalah Kemerdekaan Papua dan integrasi yang lazim disebut “Merdeka harga mati atau NKRI harga mati”. Masyarakat Papua lebih mendukung dialog dengan tujuan terciptanya tanah Papua yang damai tanpa kekerasan, tanpa pelanggaran HAM dan tanpa kejahatan, tanpa rintihan, ratapan, tangisan, kesedihan. Dialog yang dilaksanakan tentu berpedoman pada prinsip-prinsip universal seperti cinta kasih (*compassion*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*), dan kebenaran (*intruth*) bagi terciptanya dialog yang damai (*peaceful dialogue*).

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Aderito Jesus De Soares, *Perjuangan Amungme, Antara Freeport dan Militer*, ELSAM, Jakarta, 2003.

Hasil pengamatan lapangan Tim Komnas HAM di Biak Barat, 26 November 2008.

Robin Osborne, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Elsam, Jakarta, 2001, hal. 142-155.

Muridjan S. Widjojo, *Non State Actors and the Cycle of Violence in Papua*, , LIPI, 2006.